



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Jokotole No. 143 Telp. (0324) 322613 Pamekasan

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR : 188 / 18 / 432.200 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan rencana aksi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan Keputusan Inspektorat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama merupakan acuan yang digunakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Pamekasan.
- Ketiga : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 01 November 2022

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**



MOHAMAD ALWI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan
2. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Melalui Penguatan Pengawasan
3. Tugas : membantu bupati dalam membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah
4. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Tingkat Kapabiilitas APIP;	Penilaian kapabiilitas APIP dengan komponen yang terdiri dari 6 elemen dengan masing-masing bobot nilai, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan SDM (18%) 2. Praktik profesional (18%) 3. Akuntabilitas dan manajemen kinerja (6%) 4. Budaya dan hubungan organisasi (6%) 5. Struktur tata kelola (12%) 6. Peran dan layanan APIP (40%) Penilaian kapabiilitas APIP akan menghasilkan level kapabiilitas	Laporan Hasil Evaluasi kapabiilitas APIP BPKP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>APIP dari Level 1 s.d. Level 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimized (Level 5) 2. Institutionalized (Level 4) 3. Delivered (Level 3) 4. Struktured (Level 2) 5. Initial (Level 1) 		
	Tingkat Maturitas SPIP	<p>Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi pembobotan pada 3 komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tujuan 2. Struktur dan proses 3. Pencapaian tujuan <p>Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang dengan interval:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rintisan ($1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$) 2. Berkembang ($2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$) 3. Terdefinisi ($3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$) 4. Terkelola dan Terukur ($4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$) 5. Optimum ($\text{skor} \geq 4,50$) 	Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP BPKP	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	<p>Evaluasi dilakukan komponen manajemen kinerja yang meliputi 4 komponen yang dituangkan dalam lembar kerja evaluasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja 2. Pengukuran kinerja 3. Pelaporan kinerja 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal <p>Nilai akhir penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (nilai > 90-100) 2. A (nilai > 80-90) 3. BB (nilai > 70-80) 4. B (nilai > 60-70) 	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah	Sekretaris

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		5. CC (nilai > 50-60) 6. C (nilai > 30-50) 7. D (nilai > 0-30)		

Pamekasan, 01 November 2022

